

EDISI : Kamis, 11 November 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Kamis, 14 November 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Aparatur Kecamatan Dipacu Tingkatkan Kualitas Evaluasi APBDesa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten buleleng terus berupaya memacu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kali ini, dinas PMD Buleleng melaksanakan kegiatan in house training peningkatan kepastian bagi personil kecamatan dan sejumlah staf pada dinas PMD yang selama ini bertugas melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa.	
		Sarasehan kepahlawanan, Pacu semangat Generasi bangsa	Guna memacu semangat generasi bangsa dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan republic Indonesia pemerintah kabupaten buleleng melalui dinas sosial. Kabupaten buleleng menggelar sarasehan tentang kepahlawanan serangkaian dengan peringatan hari pahlawan ke-74 hut ke-73 puputan margarana dan napak tilas perjuangan pahlawan nasional I gusti ngurah rai bertempat di monument perjuangan tri yudha sakti, selasa (12/11)malam lalu.	
2	NUSA BALI	Anggaran Disdikpora Dipangkas Rp 40 Miliar	Fokus pembangunan revitaliasasi pasar banyuasri, membuat sejumlah anggaran di masing-masing organisaasi perangkat daerah kabupaten buleleng dicitukan. Salah satunya dinas pendidikan pemuda dan olahraga buleleng paguanggaran di tahun 2020 dipotong rp 40 miliar. Pemotongan anggaran tersebut membuat sejumlah program disdikpora belum memiliki anggaran tdan terancam tidak bisa terlaksanakan.	

		Lahan Hotel Melka Dijadikan kantor Cabang PDAM	Lahan seluas 700 meter persegi yang selama ini dikuasai oleh hotel Melka, di Desa Kalibukbuk, kecamatan buleleng, berhasil diambilkan oleh pemkab buleleng. kini lahan tersebut diserahkan pada PDAM Buleleng untuk lokasi pembangunan kantor cabang.	
--	--	--	---	--



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *RADAR BALI*

Kategori : *JAMINAN KESEHATAN*

Dewan Minta Jaminan Kesehatan Baru

Potensi Langgar UU, Sekkab Tegaskan Pakai JKN

SINGARAJA, *Radar Bali* - DPRD Buleleng meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertimbangkan membuat jaminan kesehatan baru. Jaminan ini hanya diperuntukkan bagi warga Buleleng yang belum tertampung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang telah berjalan setahun terakhir.

Desakan itu mencuat seiring dengan minimnya anggaran daerah. Kini sebagian besar pembiayaan pada APBD 2020, dialokasikan untuk revitalisasi Pasar Banyuasri. Sementara untuk jaminan kesehatan membutuhkan biaya, tak kurang dari Rp 45 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranasari mengatakan, alokasi anggaran yang disediakan untuk program JKN sebenarnya sudah cukup besar. Namun, dengan asumsi kenaikan iuran BPJS kelas 3 dari Rp 25.500 per orang menjadi Rp 42.000 per orang, diyakini akan memberikan dampak besar



BERI MASUKAN: Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranasari mengusulkan pemkab untuk membu

bagi keuangan daerah.

"Kalau iuran BPJS naik, artinya *kan* kita harus siapkan anggaran dua kali lipat dari sebelumnya. Apabila naik, kita akan mengeluarkan anggaran lebih besar," kata Rani saat ditemui

di DPRD Buleleng kemarin (13/11).

Untuk menghemat anggaran, ia mengusulkan agar pemerintah membuat jaminan sosial tersendiri. Jaminan itu hanya diperuntukkan bagi

warga yang selama ini belum masuk dalam program JKN. Anggaran untuk jaminan sosial tersebut, dapat diambil melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rani menyebut, program itu sudah berhasil di sejumlah

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *SAMBUHAN*



Nanti kami pertimbangkan. Sebab dalam ketentuan hanya ada satu jaminan kesehatan, yakni JKN. Kami saat ini fokus melakukan validasi pada masyarakat yang benar-benar butuh. Itu harus tuntas sepenuhnya."

DEWA KETUT PUSPAKA
Sekkab Buleleng

Kesehatan Bali Mandara) dulu. Kami menyarankan agar bupati berani membuat jaminan kesehatan tersebut, demi kesejahteraan masyarakat Buleleng," imbuhnya.

Sementara itu Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang ditemui terpisah mengatakan, amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Cukup 37.677 orang yang belum masuk JKN itu saja yang dibuatkan jaminan sosial. Bahasa gampangnyasih kembali ke sistem seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) dulu."

LUH HESTI RANITASARI
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng

Sosial Nasional (SJSN), hanya ada satu jaminan kesehatan. Yakni JKN. Apabila ada usulan seperti itu, kemungkinan besar usulan itu tak dapat direalisasikan. "Nanti kami pertimbangkan. Sebab dalam ketentuan hanya ada satu jaminan kesehatan, yakni JKN. Kami saat ini fokus melakukan validasi pada masyarakat yang benar-benar butuh. Itu harus tuntas sepenuhnya," kata Puspaka.

Ia menyebut pemerintah akan melakukan pembahasan lebih detail pada rapat Forum Kemitraan. Forum itu terdiri dari pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana SJSN. "Nanti kami detailkan lagi saat rapat forum kemitraan," tukasnya. (eps/gup)

daerah lain.

"Cukup 37.677 orang yang belum masuk JKN itu saja yang dibuatkan jaminan sosial. Bahasa gampangnyasih kembali ke sistem seperti JKBM (Jaminan

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **RADAR BALI**

Kategori : **TENAGA KONTRAK**

Hampir Empat Ribu, Pegawai Kontrak Tak Efektif

SINGARAJA, *Radar Bali* - Pemerintah Kabupaten Buleleng didesak melakukan pengendalian terhadap jumlah pegawai kontrak yang jumlahnya hampir mencapai empat ribu orang atau tepatnya 3.900 orang. Jumlah itu pun dianggap tak efektif, karena beban kerjanya tak sebanding. Di sisi lain, dana yang dihabiskan mencapai Rp 90 miliar dengan rata-rata gaji Rp 1,5 juta per bulan.

"Pengendalian itu bukan berarti pemangkasan. Tapi kalau misalnya ada pegawai kontrak yang berhenti, *nggak* usah dicari penggantinya," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Buleleng Wayan Teren saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng kemarin

(13/11). Kalau toh posisi itu sangat dibutuhkan, Teren menyarankan agar melakukan pergeseran pegawai kontrak. Misalnya dari instansi yang tenaganya berlebih, ke instansi yang membutuhkan tambahan tenaga. "Saya yakin dalam tiga tahun mendatang akan dapat postur yang ideal dan kinerja yang jauh lebih efektif. Ini

juga tidak akan terus menerus membebani keuangan daerah," katanya.

Sementara itu Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengatakan, kini pemerintah sebenarnya sudah melakukan moratorium rekrutmen tenaga kontrak. Moratorium itu seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Buleleng beberapa

bulan lalu. Rekrutmen hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari bupati. Hanya saja, Puspaka menyebut ada sejumlah kebutuhan tenaga teknis yang harus diisi oleh tenaga kontrak. Contohnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan. (eps/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **RAPAR BALI**

Kategori : **KANTIBMAS**

Polisi Waspada, Pengamanan Diperketat

SINGARAJA, Radar Bali - Menyusul terjadi ledakan bom bunuh diri di Mapolresta Medan, Sumatra Utara. Personil kepolisian Polres Buleleng langsung meningkatkan pengamanan penjagaan di Mapolres Buleleng Rabu (13/11). Terutama pada pintu masuk ke Polres. Masyarakat yang memasuki mako Polres Buleleng tak luput dari pemeriksaan.

"Sebanyak 26 personil kami siagakan untuk memperketat pengamanan. Peningkatan pengamanan dilakukan pasca bom di Medan dan mengantisipasi serangan teror yang sama," kata Kabag

Ops Polres Buleleng Kopol AA, Wiranata Kusuma. "Seluruh anggota sudah diminta lebih waspada lagi dan meningkatkan keamanan," ujarnya.

Meski penjagaan diperketat segala aktivitas pelayanan di Polres tetap dilakukan mengingat saat ini banyak masyarakat yang memerlukan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk keperluan pendaftaran tes CPNS. "Kami himbau masyarakat yang datang ke mako Polres Buleleng untuk berpakaian yang wajar dan pantas. Dihusahkan membuka kaca matanya dan jaket yang dipengunakan," tukasnya. (uli/gup)



ANTISIPASI: Sejumlah personil provost dan dalmas bersenjata lengkap melakukan pemeriksaan di depan Mapolres Buleleng.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Pendidikan*

Disdikpora Tidak Punya Anggaran Unas

Pembahasan APBD 2020

SINGARAJA, *Radar Bali* - Pembahasan anggaran untuk APBD 2020 mendatang berlangsung pelik. Pemkab Buleleng memangkas anggaran di sejumlah dinas secara maksimal. Anggaran itu digeser untuk pembangunan Pasar Banyuasri dan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemangkasan anggaran itu ternyata

memberikan dampak ke sejumlah instansi teknis. Contohnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng. Alokasi anggaran pada 2019 yang tadinya mencapai Rp 200 miliar, pada 2020 diturunkan menjadi Rp 154 miliar saja.

Penurunan alokasi belanja itu berdampak pada pemangkasan program di Disdikpora Buleleng. Bahkan sejumlah kegiatan rutin, kini belum mendapat sumber pen-

danaan. Padahal kegiatan rutin itu mutlak dilaksanakan. Setidaknya Disdikpora butuh tambahan dana Rp 18,6 miliar lagi agar bisa menjalankan program tersebut.

Sejumlah kegiatan yang hingga kini belum memiliki sumber pendanaan yakni pelaksanaan Ujian Sekolah, pelaksanaan Ujian Nasional (Unas), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), evaluasi dan monitoring pendidikan, peringatan hari besar

nasional, rekrutmen Paskibraka kabupaten, serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Seni dan Pelajar (Porsenijar) Buleleng.

"Alokasi anggaran pemerintah sangat terbatas. Kami sangat bisa memahami hal itu. Untuk tahun depan memang ada beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan. Ini masih dibicarakan bersama tim anggaran," kata Kepala Disdikpora Buleleng, Gde

Dharmaja yang ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Buleleng, Rabu (13/11).

Lebih lanjut Dharmaja mengatakan, sebenarnya ada sejumlah program lain yang harus dilaksanakan, namun terpaksa ditangguhkan. Program itu yakni pelatihan calon kepala sekolah (cakep) dan calon pengawas (cawas). Program ini tadinya diniatkan untuk melatih para tenaga pendidik sehingga posisinya

bisa naik menjadi kepala sekolah atau pengawas.

"Sebab sekarang jadi kepala sekolah dan pengawas itu wajib punya sertifikasi. Kalau tidak punya sertifikasi itu, mereka tidak dapat tunjangan. Sedangkan tiap tahun jumlah kepala sekolah dan pengawas *kan* terus berkurang. Kami akan upayakan cari sumber pendanaan dari pusat untuk program ini," ujarnya. (eps/dot)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **RADAR BALI**

Kategori : **BASARNAS**

BASARNAS

Latih Evakuasi, Bangun Tower Refling

GEROKGAK, Radar Bali - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pos Buleleng akhirnya memiliki fasilitas tower refling. Tower refling biasanya digunakan sebagai sarana latihan oleh petugas SAR dalam melakukan evakuasi korban yang terjatuh dari tebing, turun dari helikopter dan penanganan evakuasi lainnya.

Kepala Basarnas Pos Buleleng Dewa Putu Hendri Gunawan yang dikonfirmasi Rabu (13/11), mengakui pembangunan tower refling setinggi 12 meter dilakukan bulan Juli lalu dan rampung 100 persen pada bulan ini. Dengan pengerjaan dan anggaran langsung dari Badan Sar pusat.

Diakuinya kembali, sejak berdiri Pos SAR di Buleleng sama sekali belum memang belum memiliki tower refling. Sementara pos-pos sar lainnya seperti Jembrana dan Karangasem sudah memiliki tower refling. "Tower refling sejatinya dibangun untuk menunjang kegiatan latihan dan simulasi dalam melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan laut, jatuh dari tebing dan penanganan evakuasi korban dari helikopter dengan dibantu tandu dan penanganan kecelakaan lainnya," tuturnya. (uli/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

∞ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ∞



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : RADAR BALI

Kategori : PERDA SAMPAH

PENEGAKAN PERDA

Pol PP Ancam Lakukan OTT Sampah

SINGARAJA, *Radar Bali* - Polisi Pamong Praja berjanji akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada warga yang terbukti membuang sampah sembarangan. Pol PP menyatakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan sampah, telah berlaku secara penuh. Sehingga sanksi berupa pidana penjara dan denda juga dapat diimplementasikan.

Kasat Pol PP Buleleng Putu Dana mengatakan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng telah membahas rencana implementasi perda tersebut. Nantinya, kata dia, Pol PP dan DLH akan mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di masing-masing instansi.

"Kami punya satu PPNS. Sekarang di DLH juga punya PPNS satu orang. Kebetulan pindahan dari Pol PP juga. Jadi kami sudah sepakat peran PPNS ini akan dioptimalkan," kata Dana saat ditemui di DPRD Buleleng kemarin (13/11).

Dalam waktu dekat ini, lanjut dia, PPNS bersama DLH Buleleng dan Pol PP Buleleng melakukan patroli rutin. Apabila dalam patroli itu PPNS menemukan warga yang buang sampah sembarangan, maka akan dilakukan OTT. "Ada PPNS, ada bukti, dan saksi, langsung kami bawa perkaranya ke pengadilan. Tinggal tunggu jadwal sidang tipiring saja dari pengadilan. Kami sudah kantongi wilayah-wilayah mana saja yang rawan," imbuhnya.

Selain itu, Dana juga menginstruksikan personilnya melakukan pemantauan secara berkala. Meski tak bisa melakukan OTT, personil Pol PP bisa melaporkan temuannya pada PPNS. Nantinya PPNS yang menindaklanjuti laporan dari personil patroli.

"Kalau nanti dari personil patroli, bisa mengambil KTP-nya, amankan barang bukti, laporkan ke PPNS. Nanti kami panggil orangnya ke Pol PP biar diproses. Masyarakat juga boleh melapor, yang penting ada foto sebagai bukti, dan siap jadi saksi," katanya lagi.

Ia menegaskan penegakan perda sampah tak lagi mengambil opsi-opsi pembinaan. Namun, sudah mengarah pada penegakan hukum. Langkah penegakan hukum diharapkan bisa menjadi efek jera bagi masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan.

Sekadar diketahui pada Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi. Yakni sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau denda maksimal Rp 25 juta. (eps/dot)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~